

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Agusti, A.F. (2014). *Faktor determinan akuntabilitas dan transparansi kementerian/lembaga*. (Tesis), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok
- Agoes, S. (2012). *Auditing : Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Akbar, B. (2015). *Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia*. Jakarta : Pusat Kajian Keuangan Negara.
- Arens, A.A, Elder, R.J, & Beasley, M.S. (2008). *Auditing dan jasa assurance (edisi kedua belas)*. Jakarta : Erlangga
- Arifin, I & Fitriyani, D. (2014). Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006a). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, I. (2006b). Standar akuntansi pemerintahan : Kebutuhan atau tuntutan politis, Dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar akuntansi pemerintahan telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2005* (hlm. 1-11). Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Bastian, I. (2007c). *Akuntansi untuk yayasan dan lembaga publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010d). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. (edisi ketiga). Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Rapot merah tujuh Kementerian*. Warta BPK edisi 06 Vol. V Juni 2015
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Panduan manajemen pemeriksaan tahun 2008*. Jakarta: BPK RI.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2015*. Jakarta: BPK RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Pemeriksaan Keuangan Negara (Diklat Teknis KAP)*. Jakarta: BPK RI
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah implementasi pasca reformasi*. Jakarta : RMBOOKS PT Wahana Semesta Intermedia.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. (2012). Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol, 12, 16*.
- Heriningsih, S. & Ruserlistyani. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13(2), 11-19*.
- Hilmi, A. Z., dan Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Hilmi, A. Z. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. (Skripsi). Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Huang, R.B. & Wang, Y.T, (2010). The empirical study on provincial government audit quality (2002–2006). *Accounting Research 6, 70–76* (in Chinese).
- Ikhsan, A. (2008). *Metodologi penelitian akuntansi keperilakuan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Indranata, I. (2006). *Terampil dan sukses melakukan audit mutu internal*. Bandung: Alfabeta.
- Indrawan, R & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Islahuzzaman. (2012). *Istilah-istilah akuntansi & auditing*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iqbal. M & Kusufi, M.S. (2013). Memahami arti penting PSAP Nomor 01 pada PP Nomor 24 dan Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, Dalam Halim, A & Kusufi, M.S (Penyunting). *Teori, konsep, dan aplikasi*

- akuntansi sektor publik dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Kusufi, M. S & Kusumawardani, N. (2013). Seluk beluk pengauditan dan peran SPKN dalam audit di pemerintahan, Dalam Halim, A & Kusufi, M.S (Penyunting). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik dari anggaran hingga laporan keunagan dari pemerintah hingga tempat ibadah.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006.* (Skripsi). Akuntansi FE, Universitas Indonesia, Depok.
- Mahmudi. (2006a). Reformasi keuangan negara dan daerah di era otonomi. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar akuntansi pemerintahan telaah ktitis PP Nomor 24 Tahun 2005* (hlm. 23-39). Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Mahmudi. (2007b). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah.* Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2006). Tinjauan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar akuntansi pemerintahan telaah ktitis PP Nomor 24 Tahun 2005* (hlm. 41-58) Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Martani D., dan Liestiani, A. (2012). Disclosure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting & Finance, Vol 3. No.1.*
- Mardiasmo. (2004a). *Akuntansi sektor publik.* Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mardiasmo. (2009b). *Akuntansi sektor publik.* Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mayangsari, S & Wandanarum, P. (2013). *Auditing pendekatan sektor publik dan privat.* Jakarta : Media Bangsa.
- Milal, A. Z. (2013). Makna Opini Audit WTP Bagi Kementerian/Lembaga (Studi Kasus Pada Kementerian Sosial). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2).*
- Mustikarini, W.A., dan Fitriyani, D. 2012. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah

- kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional XV. Banjarmasin*
- Mutasowifin, A. (Penyunting). (2008). *Memahami laporan keuangan (edisi ketujuh)*. Jakarta : PT Indeks
- Noor, J. (2013). *Metodologi penelitian: skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nurdiono, dkk. (2015). Pengaruh proporsi anggaran dan faktor non keuangan pada hasil audit LKPD di seluruh Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan.
- Rai, I. G. A. (2011). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, dan studi kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Rahayu, S. K & Suhayati, E. (2010). *Auditing : Konsep dasar dan pedoman pemeriksaan akuntan publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sari, A.P., Martani, D & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan
- Sawyer, L.B, *et al.* (2005). *Audit internal Sawyer*. (edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum,D. (2015). *Kualitas auditor, pengawasan legislatif, dan pemanfaatan hasil audit dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. (Disertasi). Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sugiono, A & Untung, E. (2008). *Panduan praktis dasar analisa laporan keuangan (pengetahuan dasar bagi mahasiswa dan praktisi perbankan)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suhaputra, Uhar. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sujarweni, W.V. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Tuanakotta, Theodorus M. (2014). *Audit berbasis ISA (Internatonal Standars on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat

- Tunggal, A. W. (2011). *Audit manajemen dan audit keuangan historis*. Jakarta: Harvarindo
- Winanti, B. A. (2014). *Analisis pengaruh temuan dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, legitimasi kepala daerah serta pengawasan pemerintahan terhadap opini audit LKPD 2010-2011*. (Skripsi). Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Wirartha, I Made. (2006). *Metodologi penelitian sosial ekonomi*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas PMK No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2007 Tentang Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan